

**PASRAMAN SEBAGAI ENERGI PENDIDIKAN
AGAMA DAN SENI HINDU DALAM DOMINASI
DAN HEGEMONI PENDIDIKAN MODERN**

I Ketut Suda

Prodi Pendidikan Agama Hindu, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
Jl. Sangalangit, Tembau, Denpasar Timur, Bali
Email: suda.unhidps@yahoo.co.id

ABSTRAK. Artikel ini ditulis dalam rangka mengkaji keberadaan pendidikan *pasraman*, yakni sebuah model pendidikan Hindu yang keberadaannya sampai saat ini masih belum begitu jelas. Hal ini disebabkan dalam kurun waktu yang sangat lama belum ada kekuatan hukum yang jelas berupa Peraturan Menteri Agama yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan teknis dari lembaga *pasraman* atau *pasantian* sebagai salah satu lembaga pendidikan formal dalam agama Hindu. Di samping itu, adanya dominasi dan hegemoni pendidikan modern terhadap lembaga-lembaga pendidikan tradisional, termasuk lembaga pendidikan *pasraman* yang berbasis pendidikan agama dan budaya, membuat keberadaan pendidikan ini menjadi semakin termarjinalkan dalam masyarakat. Untuk membahas keberadaan *pasraman* sebagai lembaga pendidikan formal agama Hindu dalam konteks pendidikan modern, maka penulis memandang perlu melakukan kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut. Untuk itu, penulis melakukan kajian ini dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya, belakangan ini dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No.56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, telah memberikan angin segar bagi kelangsungan hidup lembaga pendidikan *pasraman* sebagai lembaga pendidikan Hindu ke depannya. Akan tetapi untuk memantapkan pelaksanaan pendidikan *pasraman* dan agar lembaga pendidikan ini mampu bersaing dengan lembaga pendidikan modern yang telah berkembang pesat saat ini, maka masih perlu usaha maksimal dari para pengelola lembaga pendidikan *pasraman* ini, baik menyangkut aspek manajemennya, aspek kurikulumnya, strategi yang diterapkan, maupun berbagai infrastruktur pendukung pendidikan *pasraman* itu sendiri.

KATA KUNCI: Pendidikan *pasraman*, pendidikan modern, Peraturan Menteri Agama

**PASRAMAN AS ENERGY OF RELIGIOUS EDUCATION AND ARTS OF HINDU
IN DOMINATION AND HEGEMONY
OF MODERN EDUCATION**

ABSTARCT. This article was written for the purpose of studying *pasraman* education, a model of Hindu education whose existence is not yet clear. This is because in the very long time there is no clear legal force in the form of Regulation of the Minister of Religion which can be used as guidance of technical implementation of *pasraman* or *pesantian* institution as one of the formal education institution in Hinduism. In addition, the dominance and hegemony of modern education to traditional educational institutions, including religious and cultural based *pasraman* education, makes the existence of these educational institutions become increasingly marginalized in society. To discuss the existence of *pasraman* as a formal educational institution of Hindu religion in the context of modern education, the authors considered the need to conduct a more in-depth study of it. For that, the authors conducted this study with qualitative descriptive

method. However, lately with the issuance of Regulation of the Minister of Religious Affairs No.56 of 2014 on Hindu Religious Education, has provided fresh air for the survival of pasraman educational institutions from its juridical aspect. However, to strengthen the implementation of education pasraman and for this educational institution able to compete with modern educational institutions that have grown rapidly at this time, it still needs the maximum effort from the managers of these institutions pasraman education, both regarding aspects of management, curriculum aspects, strategies applied, as well as various educational support infrastructure pasraman itself.

KEYWORDS: *Pasraman* education, modern education, Regulation, Minister of Religious Affairs

I. PENDAHULUAN

Pasraman sebagai salah satu media pendidikan agama yang dimiliki oleh umat Hindu Indonesia, secara umum terdiri atas beberapa macam di antaranya, ada *pasraman* anak-anak, *pasraman* remaja, *pasraman pemangku*, *pasraman banten*, dan yang lainnya, sesuai dengan kelompok usia pesertanya, atau aktivitas, dan tujuan yang hendak dicapai. Keberadaan *pasraman-pasraman* tersebut berdasarkan pengamatan lapangan memang sudah berjalan dalam rentang waktu yang sangat lama, namun di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin modern dewasa ini, maka dipandang perlu dilakukan kajian ilmiah terhadap keberadaan *pasraman* itu sendiri, sehingga eksistensinya dapat dipahami secara akademik.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh *pasraman* selama ini adalah belum adanya kekuatan hukum yang jelas berupa Peraturan Menteri Agama yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan teknis dari lembaga *pasraman* atau pasantian sebagai salah satu lembaga pendidikan formal dalam agama Hindu. Baru kemudian per 23 Desember 2014 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No.56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, yang salah satu pasalnya, yakni pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa *pasraman* formal adalah jalur pendidikan *pasraman* yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan *pasraman* nonformal adalah jalur pendidikan di luar *pasraman* formal yang dilaksanakan secara terstruktur.

Ketidakpastian landasan hukum terhadap keberadaan *pasraman* dalam rentang waktu yang cukup lama ini, pastinya berimplikasi terhadap proses pelaksanaan *pasraman* itu sendiri, baik menyangkut masalah pendanaan, kurikulumnya, maupun terhadap pengadaan infrastruktur penunjang pelaksanaan *pasraman* tersebut. Jadi, *pasraman* yang berjalan selama ini, baik di Bali maupun di tempat-tempat lainnya di Indonesia adalah *pasraman* nonformal yang pelaksanaannya

bersifat insidental dan temporal, yakni hanya mengikuti liburan sekolah dan hari-hari libur lainnya tanpa dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang jelas.

Implikasi ketiadaan aturan teknis pelaksanaan *pasraman* seperti itu adalah tidak adanya kesamaan sistem pelaksanaan *pasraman* di masing-masing *desa pakraman*, atau di berbagai lembaga sosial di luar *desa pakraman*, sebab semuanya menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, *output* dari kegiatan tersebut yang berupa produk lulusan pun sulit diukur secara pasti. *Pasraman* sebagai sistem pendidikan Hindu seharusnya memiliki program kerja dan sasaran yang jelas serta metode pelaksanaan yang valid untuk bisa diikuti oleh seluruh umat Hindu demi peningkatan kualitas keagamaannya.

Ke depan, dengan keluarnya PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama No.56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, maka *pasraman* sebagai salah satu sistem pendidikan Hindu, benar-benar dapat diharapkan sebagai energi pendidikan agama dan seni Hindu, sehingga generasi muda Hindu ke depan tidak hanya menjadi generasi terdepan di bidang ilmu dan teknologi, tetapi juga terdepan di bidang moralitas dan spiritualitas.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pendidikan Modern sebagai Alat Hegemoni

Jika mengacu pada Gramsci dalam ‘*Selections from Prison Notebooks*’, maka dapat dipahami bahwa konsep hegemoni tidak hanya berupa dominasi politik lewat kekuatan (*force*), tetapi juga dominasi kultural lewat kepemimpinan intelektual dan moral. Artinya, dalam konsep hegemoni tersebut ada semacam dominasi intelektual, moral, dan gagasan-gagasan, yang melaluinya terjadi pengendalian penguasaan (pikiran, mental, dan kesadaran) publik di dalam sebuah masyarakat. Jadi, singkatnya dapat dikatakan bahwa hegemoni menciptakan semacam penerimaan publik terhadap sebuah prinsip, gagasan, atau ide, yang disebarluaskan melalui berbagai bentuk institusi, termasuk institusi pendidikan.

Pandangan Gramsci sedikit berbeda dengan pandangan Marxis Ortodok, yang memandang bahwa hegemoni adalah suatu revolusi kelas, yakni gerakan sosial untuk melakukan perubahan. Namun, menurut Gramsci hegemoni menggabungkan kekuatan dan kesepakatan, tergantung pada situasi suatu masyarakat (Suda,2009:192—193). Terkait dengan konsep hegemoni dan jika dilihat pendidikan modern sebagai alat hegemoni, maka terminologi Gramsci sangat cocok dijadikan alat analisis dalam mengkaji persoalan ini. Sebab menurut Fakih

(2004:29—30) modernisme dengan pola pikir *oposisi biner* tidak saja berujung pada pemujaan terhadap budaya global putih, tetapi juga pada penguatan pengadopsian kebudayaan Barat itu sendiri. Akibatnya, banyak tradisi masyarakat Bali, termasuk pendidikan *pasraman* yang harus diadaptasikan, dimarjinalkan, bahkan disingkirkan karena tidak sesuai dengan tuntutan modernisme. Hal ini tidak hanya karena pengetahuan dan teknologi Barat yang dominatif dan hegemonik, tetapi juga karena di dalam modernisasi tradisi dipahami sebagai bagian dari masalah yang harus ditransformasikan.

Kuatnya dominasi dan hegemoni pengetahuan dan teknologi Barat terhadap berbagai hal yang berbau tradisi, membuat sistem pendidikan Hindu yang disebut *pasraman* ini, menjadi sangat sulit untuk bersaing di tengah-tengah tuntutan masyarakat yang semakin modern dewasa ini. Padahal pendidikan yang berbasis agama seperti *pasraman* pada esensinya menekankan pembentukan moralitas dan spiritualitas peserta didik, di samping juga memberikan nilai-nilai pengetahuan secara umum. Hal ini dimaksudkan agar selain anak-anak mampu memahami berbagai macam pengetahuan modern, juga mampu mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama, kemudian direkonstruksi secara komprehensif dan dinamis guna membangun masyarakat yang bermoral dan beradab (Ma'arif, 2005:viii).

Namun, pada kenyataannya harapan-harapan ideal yang digantungkan pada pendidikan-pendidikan yang berbasis agama oleh para *elite* pendidikan dan kaum agamawan tersebut justru ada kecenderungan hanya bersifat *pseudo* (palsu). Hal ini dikarenakan materi ajar yang bernuansa agama, diklaim sebagai mata ajar yang kurang penting (baca: kelas dua) sementara materi ajar yang bersumber pada pengetahuan Barat, seperti matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Biologi, Fisika, dan Kimia (eksakta) dipandang sebagai mata pelajaran yang teramat penting (kelas satu) (Suda dalam Wartam, Edisi 3/th1, Mei 2015:10). Hal ini membuktikan betapa kuatnya dominasi dan hegemoni pengetahuan Barat terhadap hal-hal yang berbau tradisi atau terhadap pengetahuan dunia Timur. Salah satunya disebabkan oleh pengetahuan Barat cenderung bertumpu pada hal-hal yang bersifat praktis, ekonomis, dan efisien.

Hal ini sejalan dengan pandangan Dewey (2001:23—28) yang mengatakan bahwa pragmatisme merupakan suatu sistem filsafat yang mementingkan hal-hal yang bersifat praktis (*practicality*) dan kerja keras yang kriteria utamanya adalah sukses finansial. Oleh karenanya model pendidikan pragmatisme cenderung menghasilkan sikap-sikap (1) praktis (*practicality*); (2) kerja keras (*workability*); (3) mempunyai nilai uang (*cash value*); (4) personalisme dan dinamisme; (5) menolak kepasrahan (*aggressive*); (6) pasti bisa kalau ada kemauan; (7)

menjelajah (*achievement status*); (8) alam sebagai objek; (9) demokrasi; (10) skularisme. Dari kenyataan tersebut, masyarakat tidak lagi memahami pendidikan (baca:sekolah) sebagai arena untuk mencerdaskan kehidupan peserta didiknya, tetapi lebih diarahkan pada sebuah pemahaman bahwa pendidikan merupakan alat untuk mencetak sumber daya manusia yang siap berhadapan dengan dunia kerja dan mimpi-mimpi indah pun terbangun di dalamnya.

Implikasinya, pendidikan yang menekankan pembentukan sikap moralitas dan spritualitas, seperti pendidikan *pasraman* cenderung tersingkirkan, padahal pendidikan *pasraman* selain menerapkan kurikulum nasional, juga mengembangkan berbagai pendidikan keagamaan. Pendalaman pendidikan *pasraman* mencakup juga praktik *upakara*, praktik pertanian, latihan menari, dan *mekidung*. Dalam rangka pembentukan karakter anak-anak sesungguhnya, materi ini dapat menjadi energi bagi pengembangan nilai-nilai agama dan nilai-nilai seni dalam konteks Hindu. Sebab masyarakat secara umum dewasa ini, cenderung mempunyai mimpi-mimpi agar anaknya bisa diterima di sekolah-sekolah yang berlabelkan sekolah unggulan, favorit, dan berbagai jenis sekolah modern lainnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa telah terjadi dominasi dan hegemoni ilmu pengetahuan sains terhadap ilmu-ilmu sosial-humaniora. Bermula dari adanya anggapan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah terletak pada ilmu pengetahuan yang meletakkan fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat, kemudian berakibat ilmu pengetahuan nonpositivisme (ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak melakukan pengukuran dan verifikasi terhadap fenomena yang menjadi objek garapannya) menjadi terpinggirkan (termarjinalkan).

2.2 Kurikulum Pendidikan *Pasraman*

Berbicara soal kurikulum, seharusnya dapat dipandang sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar *text-book*, *subject-matter*, atau harus dipandang lebih dari sekadar rangkaian pelajaran. Menurut Brown sebagaimana dikutip Suda (dalam Majalah Wartam, edisi 23/th 2/Jan 2017:6) bahwa kurikulum merupakan situasi kelompok yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah (administrator) untuk membuat perubahan tingkah laku yang tidak terputus dari anak-anak menuju remaja, melalui pintu sekolah. Dalam konteks ini, Brown menegaskan ada tiga prinsip sosiologis yang dapat digunakan untuk memandang kurikulum secara keseluruhan antara lain: (1) perubahan kurikulum bersifat gradual, yang mencerminkan nilai-nilai dasar-kultural, dari sebuah masyarakat; (2) kurikulum sekolah harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa; (3)

kurikulum pasti terus-menerus berubah menuju suatu bentuk yang efektif dari tujuan sosial yang telah ditentukan.

Kurikulum pendidikan *pasraman* secara umum menekankan pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan dengan materi yang lebih menekankan praktik daripada teori, seperti pelajaran agama, budhi pekerti, yoga/meditasi, dan lain-lain, tanpa mengabaikan ilmu pengetahuan alam, matematika, dan ilmu pengetahuan sains yang lainnya. Melalui pemberian pendidikan semacam itu peserta didik dibina untuk cerdas spiritual, disiplin, terampil, dan mandiri melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan dalam usaha ekonomi produktif.

Berbeda dengan sistem pendidikan *pasraman*, adalah sistem pendidikan modern (baca: sistem pendidikan sekolah) yang banyak dikritik oleh Paulo Freire sang kritikus pendidikan penting abad ini. Menurut Freire (dalam Beny Susetyo, 2005:8) praktik pendidikan di sebagian besar negara berkembang sering menjebak masyarakat pada sebuah kepatuhan yang terjadi secara alamiah terhadap “ideologi” baru, sehingga tidak ada lagi semangat pembebasan manusia dari upaya pembodohan struktural yang dilakukan oleh penguasa melalui proses hegemoni dengan kurikulum yang distandarisasi, serta kebijakan yang sentarlistik. Penerapan sistem dan metode yang tidak menghargai anak didik sebagai sosok yang bereksistensi, semakin memperkuat dan memberikan keleluasaan terhadap dominasi dan hegemoni penguasa terhadap sistem pendidikan. Kritik pedas yang dilontarkan Freire terhadap sistem pendidikan demikian adalah “pendidikan dikatakan sebagai proses dehumanisasi yang dilakukan oleh penguasa demi kekuasaannya.

Dengan sistem pendidikan seperti itu, ada kecenderungan *out put* yang dihasilkan hanya menekankan penguatan pada aspek kognisi (intelektual) anak semata, sementara aspek sikap dan psikomotorik anak cenderung terabaikan. Sementara pada sistem pendidikan *pasraman* justru penekanannya pada keseimbangan pembentukan ketiga aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan *pasraman* dapat dipandang sebagai spirit (*energy*) dari pengembangan pendidikan agama dan seni Hindu. Tetapi karena keberadaannya saat ini cenderung terdominasi dan terhegemoni oleh sistem pendidikan modern, maka keberadaan *pasraman* sebagai sistem pendidikan Hindu berada di antara hidup atau mati.

2.3 *Pasraman* sebagai Energi Pendidikan Agama dan Seni Hindu

Pasraman sebagai sebuah sistem pendidikan Hindu, dalam proses pendidikannya dimulai dengan proses *upanayana*. Dalam konteks pendidikan Hindu, tahapan awal dari kehidupan *brahmacarya* adalah proses *upanayana*, yakni proses kelahiran yang kedua (Sandika, 2011:12). Hal ini secara filosofis mengandung makna bahwa begitu anak-anak memasuki masa *brahmacarya*, mental mereka harus dibuat menjadi tabah, sederhana, dan kuat dalam menghadapi berbagai jenis tantangan, rintangan, dan hambatan dalam mempelajari sesuatu. Misalnya, mereka harus melakukan kebiasaan bangun pagi, mendahului gurunya, kemudian membersihkan diri (mandi) dan melakukan *sandya* dan *gayatri*.

Dalam proses *upanayana* ini, juga harus ditanamkan kepada para *sisya* agar mereka bisa hidup dalam kesederhanaan, taat dengan apa yang diajarkan oleh *dang guru*, taat dalam melakukan pelayanan, serta hormat kepada guru dan kepada mereka yang lebih tua dari dirinya. Selain itu, yang sangat penting dalam proses *upanayana*, dan *brahmacari* ini adalah bagaimana seorang *brahmacarya* belajar memurnikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam arti, mereka yang sedang berada dalam proses *brahmacari* ini, selain harus sibuk mempelajari berbagai pengetahuan, baik yang bersifat *aparwidya* (sains) maupun pengetahuan *parawidya* (spiritual) juga harus menyibukkan diri dalam memberi pelayanan kepada gurunya. Sebab dalam *Veda* ada disebutkan *acarya devo bhava* yang artinya, guru harus dipandang sebagai wujud Tuhan, yang layak mendapat pelayanan dari muridnya. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian anak-anak, khususnya pembelajaran agama, dapat bermuara pada *to be religious* bukan pada *to have religion*. Dalam arti orientasi pembelajaran, terutama pembelajaran agama harus lebih ditekankan pada kesalehan sosial daripada kesalehan individual.

Selain itu, dalam kurikulum pendidikan *pasraman* anak-anak selain diberikan berbagai bentuk mata ajar yang berbaur ilmu pengetahuan sains, mereka juga diberi berbagai materi keagamaan seperti Veda, Tatwa, Etika, Acara, Itiasa, Purana, Yoga, dan lain-lain. Hal menarik dari pendidikan *pasraman* adalah anak-anak selain diberi berbagai teori tentang keagamaan, mereka juga diberi berbagai bentuk pelatihan seperti *dharmagita*, *dharmawacana*, praktik keterampilan *mejejahitan*, praktik pertanian, dan lain-lain. Dengan model pembelajaran seperti itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan *pasraman* merupakan *energy* dari pengembangan pendidikan agama dan seni, khususnya agama dan seni Hindu.

Sementara yang terjadi pada sistem sekolah modern saat ini adalah pelajaran agama yang diberikan lebih banyak bersifat ritualisme dan dogmatik. Dalam arti pembelajaran agama yang lebih menekankan persoalan-persoalan hukum agama, larang-larangan, aturan-aturan dan lain sebagainya, yang kurang menyentuh persoalan mendasar terkait dengan keimanan. Agama yang diajarkan di sekolah seharusnya mampu membuka wawasan anak didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Susetyo (2005:89) orientasi pendidikan agama tidaklah cukup kalau hanya menyangkut hal-hal luar, seperti upacara, peraturan, ritus, simbol-simbol, aspek sosiologis ataupun politis dari gejala yang disebut agama, meski pun semua aspek luar tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan agama. Namun, yang penting dari sebuah kehidupan agama adalah roh atau semangat dari hukum-hukum agama tersebut, yakni iman, harapan, dan kasih. Oleh karenanya orang harus dapat membedakan antara orang yang beragama dengan orang yang beriman.

Sementara yang terjadi selama ini adalah pelajaran agama di sekolah sering terjebak pada upaya membuat orang beragama (*to have religion*). Sebab menurut pandangan ini orang yang beragama dianggap otomatis sudah beriman, meskipun orang yang beragama secara taat (rajin ke gereja, masjid, ke pura, dan-lain-lain) belum tentu beriman. Artinya, pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah sekarang ini terkesan mampu membuat orang menjadi suci, memahami ajaran agama secara detail (menuju kesalehan individual) akan tetapi kurang memberi perhatian pada masalah-masalah sosial (kesalehan sosial). Pendidikan agama semacam itu, bisa saja membuat peserta didik memahami ajaran agama secara baik, tetapi dalam berperilaku cenderung bersifat arogan, picik, dan ingin menang sendiri.

III. SIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *pasraman* sebagai sistem pendidikan Hindu dalam praktiknya belum bisa berkembang secara maksimal, sebab dalam realitasnya, keberadaan lembaga pendidikan yang benuansa Hindu ini berada di bawah dominasi dan hegemoni sistem pendidikan modern. Hal ini disebabkan sistem pendidikan *pasraman*, selain menerapkan ilmu-ilmu yang bersifat modern seperti mata pelajaran sains, juga senantiasa mengorientasikan pendidikan pada hal-hal yang bersifat tradisional. Jadi, pendidikan *pasraman* menekankan aspek keseimbangan antara nilai-nilai modernisme dengan nilai-nilai yang bersifat

tradisional, sementara sistem pendidikan modern hampir semua pembelajaran diorientasikan pada hal-hal yang berbau modern.

Untuk dapat menyejajarkan keberadaan lembaga pendidikan *pasraman* yang secara legal formal saat ini, telah mendapat pengakuan pemerintah dengan keluarnya PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta PMA No.56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, maka kedua peraturan ini perlu dipahami dan dijabarkan dalam kurikulum untuk pengembangan pendidikan pasraman serta perlu ada usaha maksimal dari para pengelola pendidikan *pasraman* untuk secara sungguh-sungguh melaksanakannya sesuai regulasi yang ada. Sebab jika tidak, keberadaan lembaga pendidikan yang berbasiskan agama dan kebudayaan Hindu ini akan senantiasa kalah bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan modern yang mendapat tempat di hati masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu usaha dan perjuangan yang sungguh-sungguh bagi para pengelola lembaga pendidikan ini, agar ke depannya bisa bertahan dan bahkan menang dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, Mansour. (2004). *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: INSIST Press Printing.
- Freire, Paulo. (1985). *Pendidikan Kum Tertindas*. Yogyakarta: LP3ES.
- Freire, Paulo. (1990). *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan* (Agung Prihantoro, dan Fuad Harif Pudyantatnto, trj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'arif Syamsul. (2005). *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Peraturan Menteri Agama No.56 Tahun (2014) tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.
- PP No.55 Tahun (2007) tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Sandika, I Ketut. (2011). *Pendidikan Menurut Veda, Shadana Spiritual bagi Generasi Muda*. Denpasar Pustaka Bali Post.
- Suda I Ketut. (2009). *Merkantilisme Pengetahuan dalam Pendidikan*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia bekerja sama dengan Paramita Surabaya.
- Suda, I Ketut. (2015). "Kasta Baru Dunia Pendidikan" (dalam *Majalah Wartam*, Edisi 3/th.1/Mei 2015. Halaman 10—11.

Suda I Ketut.(2017). Mencermati 40:60. (Dalam *Majalah Wartam* Edisi 23/Th.2/Jan. 2017. Halaman 6—7.

Susetyo, Benny, 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta:LKiS.
